

**PENGARUH PRODUKTIVITAS KERJA DAN PEMBERDAYAAN PADA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
TERHADAP KUALITAS PEMBANGUNAN DAERAH
DI KABUPATEN LUMAJANG
(Studi Pada Pasar Klakah)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik

Oleh :

MUHAMMAD MUGHNI LABIB

216.01.09.1.074



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

2020

ABSTRAK

Muhammad Mughni Labib, 216.01.09.1.074, Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, Pengaruh Produktivitas Kerja dan Pemberdayaan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Terhadap Kualitas Pembangunan Daerah Di Kabupaten Lumajang (Studi Kasus Pada Pasar Klakah), Dosen Pembimbing 1 : Bpk. Dr. Afifuddin, S. Ag., M. Si dan Dosen Pembimbing 2 : Dr. Hayat, S. AP., M. Si.

Supardi (1994) mengemukakan, pembangunan adalah suatu proses sosial yang bersifat integral dan menyeluruh, baik berupa pertumbuhan ekonomi maupun perubahan sosial demi terwujudnya masyarakat yang lebih makmur. Dalam pelaksanaannya, proses pembangunan itu berlangsung melalui suatu siklus produksi untuk mencapai suatu konsumsi dan pemanfaatan segala macam sumber daya dan modal, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber keuangan, permodalan, dan peralatan yang terus menerus diperlukan dan perlu ditingkatkan. Dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dapat timbul efek samping berupa produk – produk bekas dan lainnya yang bersifat merusak atau mencemarkan lingkungan sehingga secara langsung atau tidak langsung membahayakan tercapainya tujuan pokok pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh produktivitas kerja dan pemberdayaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terhadap kualitas pembangunan daerah secara parsial dan simultan. Metodologi penelitian pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang menggunakan regresi sebagai pengukur seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 60 responden, teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner, analisis data menggunakan uji validitas dan uji reliabelitas, serta analisis hipotesis menggunakan uji t, uji F, regresi linier berganda, dan koefisien determinasi dengan bantuan SPSS 22.0. Adapun hasil penelitian ini adalah 1) Variabel Produktivitas Kerja dan Pemberdayaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Pembangunan, telah diuji secara simultan menghasil F_{hitung} sebesar 10,685 > dari F_{tabel} sebesar 2,77 dengan nilai signifikansi $0,00 < 0,05$ menunjukkan H_a diterima dan H_0 ditolak. Pada uji koefisien determinasi menghasilkan nilai sebesar 0,247 atau sama dengan presentase 24,7% menunjukkan bahwa ada hubungan antara pengaruh variabel X_1 dan X_2 terhadap Y pada penelitian ini, sedangkan sisanya sebesar 75,3% dipengaruhi oleh variabel 2) Variabel Produktivitas Kerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Pembangunan, telah diuji secara parsial menghasil t_{hitung} sebesar 2,655 > dari t_{tabel} sebesar 2,002 dengan nilai signifikansi $0,010 < 0,05$. 3) Variabel Pemberdayaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Pembangunan, lain yang tidak diteliti pada penelitian ini, telah diuji secara parsial menghasil t_{hitung} sebesar 2,925 > dari t_{tabel} sebesar 2,002 dengan nilai signifikansi $0,05 \leq 0,05$ menunjukkan H_a diterima dan H_0 ditolak.



Kata Kunci : Pengaruh, Produktivitas Kerja, Pemberdayaan, Bappeda, Kualitas Pembangunan.



ABSTRACT

Muhammad Mughni Labib, 216.01.09.1.074, Public Administration Study Program, Faculty of Administrative Sciences, University of Islam Malang, Influence of Work Productivity and Empowerment on Regional Development Planning Agencies on the Quality of Regional Development in Lumajang Regency (Case Study on the Klakah Market), Supervisor 1: Dr. Afifuddin, S. Ag., M. Si and Supervisor 2 : Dr. Hayat, S. AP., M. Si.

Supardi (1994) argues, development is a social process that is integral and comprehensive, both in the form of economic growth and social change for the realization of a more prosperous society. In its implementation, the development process takes place through a production cycle to achieve a consumption and utilization of all kinds of resources and capital, such as natural resources, human resources, financial resources, capital, and equipment that are continuously needed and need to be improved. In achieving development goals and objectives, side effects can occur in the form of used products and others that are damaging or polluting the environment so that it directly or indirectly expresses the achievement of the main development objectives to improve the standard of living of the community.

The purpose of this study was to determine how much influence the productivity of work and empowerment on the Regional Development Planning Agency on the quality of regional development partially and simultaneously. The research methodology in this study uses a quantitative method that uses regression as a measure of how much influence the independent variable has on the dependent variable. The sample used in this study were 60 respondents, data collection techniques using questionnaires, data analysis using validity and reliability tests, and hypothesis analysis using t test, F test, multiple linear regression, and the coefficient of determination with the help of SPSS 22.0. The results of this study are 1) Work Productivity and Empowerment variables simultaneously have a significant effect on the Quality of Development, have been tested simultaneously producing an Fcount of $10.685 >$ from a Ftable of 2.77 with a significance value of $0.00 < 0.05$ indicating H_a received and H_o rejected. In the coefficient of determination test produces a value of 0.247 or equal to 24.7% percentage shows that there is a relationship between the influence of variables X1 and X2 on Y in this study, while the remaining 75.3% is influenced by variables 2) Work Productivity Variables partially influential significant to Development Quality, has been partially tested producing a tcount of $2.655 >$ from a table of 2.002 with a significance value of $0.010 < 0.05$. 3) Empowerment variable partially has a significant effect on Development Quality, others not examined in this study, have been partially tested to produce a tcount of $2.925 >$ from a table of 2.002 with a significance value of $0.05 \leq 0.05$ indicating H_a is accepted and H_o is rejected.

Keywords : Influence, Work Productivity, Empowerment, Bappeda, Development Quality.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan kerangka khusus dalam mewujudkan suatu cita-cita nasional yang mencakup segala aspek pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembangunan mental suatu bangsa, yang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa, meningkatkan kesejahteraan, serta mencerdaskan kehidupan bernegara.

Suatu pembangunan dibilang berhasil apabila sistem internal dan eksternal dapat tertata rapi, baik, dan sesuai cita yang diharapkan. Karena pada dasarnya suatu sistem dalam pembangunan itu sendiri yang mengatur alur jalannya suatu pembangunan. Dapat dikatakan suatu pembangunan akan gagal apabila sistem dan faktor didalam maupun diluarnya tidak tertata dan tidak sesuai cita yang diharap. Oleh karena itu diperlukan adanya pembenahan guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembangunan itu sendiri.

Sebagai negara berdaulat, Indonesia dituntut untuk selalu eksis ikutserta dalam mewujudkan ketertiban dunia yang tentunya bukan hanya ditujukan atas azas perdamaian bangsa - bangsa melainkan dapat pula diimplementasikan dengan terlaksananya pembangunan nasional yang rata dan menyeluruh. Pada dasarnya pembangunan nasional merupakan bentuk akumulasi dari pembangunan

daerah yang didalamnya terstruktur program – program pembangunan daerah yang harus terlaksana.

Perencanaan yang matang, terkonsep, dan profesional merupakan langkah awal dalam menciptakan suatu pembangunan daerah yang baik, sesuai, dan terarah. Suatu perencanaan yang baik dan merata ditujukan untuk menyelenggarakan perkembangan daerah dalam upaya menciptakan suatu keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan secara fisik dan mental. Sebagaimana kita ketahui pelaksanaan otonomi daerah saat ini mulai menampilkan keseriusannya, oleh karena itu suatu daerah akan tertuntut untuk selalu siap dan lebih mandiri untuk membentuk strategi pembangunan sehingga akan mampu bersaing dengan berbagai tantangan – tantangan dalam rangka mengembangkan daerahnya. Karena pada dasarnya pembangunan nasional tidak cukup mencakup pembangunan fisik belaka, melainkan berbagai aspek kehidupan yakni mental, sosial, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Oleh karena itu, perwujudan pembangunan nasional dianggap sangat penting.

Pembangunan nasional sebagai proses yang kesinambungan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat secara terencana dan terarah dalam setiap bidang kehidupan dan penghidupan rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia adalah untuk dapat mewujudkan cita – cita dan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 (Afifuddin, 2015:78)

Dalam mewujudkan pembangunan nasional yang baik dan menyeluruh, maka perlu diadakannya strategi – strategi yang profesional baik dari pemerintah ataupun masyarakat untuk bersama – sama dapat bersinergi dalam mewujudkan

pembangunan nasional melalui pendekatan – pendekatan yang optimal ke dalam ranah daerah. Sebagaimana kita ketahui, bahwa pembangunan nasional merupakan bentuk akumulasi dari pembangunan daerah. Maka para pemerintah dan stakeholder yang ada perlu memperhatikan potensi – potensi yang ada di daerah demi terwujudnya pembangunan nasional yang optimal, karena bukan hal yang tabu lagi, apabila Indonesia merupakan negara yang kaya dan majemuk yang terbagi atas provinsi, kabupaten, kota, bahkan desa. Namun rupanya hal itu masih dihantui dengan angka kemiskinan yang cenderung masih tinggi, karena minimnya optimalisasi pembangunan nasional ini yang menjadi penyebab utama kemiskinan masih banyak menjamur di seluruh pelosok negeri.

Menurut Undang Undang Pasal 1 Nomor 23 Tahun 2014 telah dipaparkan tentang otonomi daerah yang dijelaskan bahwa Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam arti luasnya dapat diartikan bahwa otonomi daerah ialah memberikan kewenangan dalam mengatur dan mengurus segala kebijakan daerah yang sesuai dengan perundang-undangan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, dalam mewujudkan suatu pembangunan daerah yang baik dan optimal, maka pemerintah membentuk suatu lembaga khusus yang menggeluti perencanaan pembangunan yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27

Tahun 1980 Tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada tingkat Provinsi dan Kabupaten ataupun Kota.

Dalam melaksanakan pembangunan daerah maka dibutuhkan pelaku – pelaku yang benar-benar mampu, jujur, ulet, dan bertanggung jawab dalam mengemban tugas yang cukup rumit tersebut. Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sangat dibutuhkan guna mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang optimal dan berkelanjutan begitupun dengan penilaian kinerja sumber daya manusia yang terlibat dan akan terlibat di dalamnya, karena dipandang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang keberadaannya dianggap sebagai penopang di bidang perencanaan pembangunan.

Peran dan fungsi pemerintah daerah adalah sebagai promotor pembangunan daerah, (Hayat, 2018:15)

Sebagaimana dipaparkan oleh Mengginson dan Mangkunegara Penilaian kinerja atau prestasi (performance appraisal) adalah suatu proses yang digunakan oleh pemimpin sebagai bagian dari bentuk evaluasi terhadap kinerja untuk menentukan apakah seorang karyawan melakukan pekerjaan dengan baik atau tidak, apakah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab (Hayat, 2018).

Oleh karena itu, selain penilaian fisik terhadap suatu pembangunan, maka diperlukan pula pendekatan tertentu dan evaluasi kinerja yang dilimpahkan kepada para pelaku pembangunan bersama stakeholder yang berkaitan guna mencegah hal - hal yang tidak sesuai dengan konsep perundang-undangan, agar suatu pembangunan daerah yang merupakan bentuk perpanjangan dari

pembangunan nasional dapat terlaksana dengan efektif, terpadu, dan berkelanjutan.

Melalui produktivitas kinerja yang maksimal dari aparat terkait akan memungkinkan dapat mempengaruhi kualitas hasil dari pembangunan. Hal ini tentunya merujuk pada peran, tugas, serta fungsi Badan Perencanaan Pembangunan yang kiprahnya berada pada system perencanaan pembangunan daerah. Setiap lembaga selalu berupaya agar pegawai bisa berprestasi dalam memberikan produktivitas kerja yang maksimal. Pada suatu lembaga produktivitas kerja merupakan aspek terpenting dalam mengukur keberhasilan menjalankan tugas atau suatu peranan. Semakin tinggi produktivitas kerja pegawai, maka output atau produk yang dihasilkan semakin berkualitas.

Berdasarkan kutipan yang dikutip oleh Malayu S.P Hasibuan (2005: 127) mengungkapkan bahwa produktivitas adalah perbandingan secara ilmu hitung antara jumlah yang dihasilkan dan jumlah setiap sumber yang dipergunakan selama produksi berlangsung. Sumber tersebut dapat berupa tanah, bahan baku, bahan pembantu, pabrik, mesin, alat, dan tenaga kerja.

Sementara untuk dapat mengetahui produktivitas kinerja pada suatu lembaga maka diperlukan adanya pengukuran melalui indikator – indikator yang sudah ditetapkan sebelumnya. Menurut Henry Simamora (2004), ada beberapa indikator yang dapat dijadikan pengukuran produktivitas kinerja, antara lain :

1. Kuantitas Kerja
2. Kualitas Kerja

3. Ketepatan Waktu

Selain penilaian kinerja yang baik, partisipasi dari pihak – pihak terkait meliputi pemerintah dan masyarakat merupakan faktor penentu dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, *control*, dan evaluasi pembangunan sehingga menghasilkan output dari kinerja pembangunan yang berkualitas dan sesuai dengan harapan. Dengan memberdayakan masyarakat dan aparatur pemerintahan, maka keberhasilan dalam suatu pembangunan semakin dapat terlaksana. Karena pada dasarnya pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk membangun daya itu, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya (Ginanjar Kartasasmitha, 1996)

Badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) sebagai lembaga yang merumuskan strategi pembangunan haruslah memperhatikan kondisi umum daerah potensi dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, tujuan utamanya adalah agar perencanaan pembangunan dapat disesuaikan dengan aspirasi masyarakat (Yudianto, 2012).

Menurut Nugraha (2017) mengemukakan Sistem perencanaan daerah menjadi satu hal yang sangat berpengaruh atas hasil akhir pembangunan. Musrenbang merupakan kerangka awal dalam tahap perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan daerah yang melibatkan SKPD setempat, yang ini tentunya telah dimandatkan oleh Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Kabupaten Lumajang adalah objek daerah penelitian ini, berada di provinsi Jawa Timur. Luas wilayah nya 1790,90 km² yang diapit oleh 3 gunung berapi yakni Gunung Semeru, Gunung Lemongan, dan Gunung Bromo, oleh karena itu tak jarang khalayak luas mengenal Kabupaten Lumajang sebagai daerah yang subur. Secara kasat mata dapat dinilai kabupaten ini telah mengalami kemajuan di berbagai bidang, salah satunya ekonomi. Tentunya keberhasilan ini tidak terlepas dari peran pihak – pihak yang bersangkutan, salah satunya Badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) yang ingin terus bersinergi guna menciptakan perubahan – perubahan kemajuan yang signifikan.

Dalam perjalannya, peranan Bappeda tentunya tidak dapat dipisahkan dari otonomi daerah untuk menyelenggarakan pembangunan seluas-luasnya yang efektif dan berkelanjutan, yang bermuara dari segi perencanaan yang matang sehingga akan menimbulkan *out put* yang benar-benar tepat dan selaras.

Peran Bappeda yang dapat tercermin melalui produktivitas kinerja dan pemberdayaan yang maksimal, harusnya dapat menganggulangi dan meminimalisir berbagai permasalahan dalam kinerja pembangunan. Pada kenyataannya masih saja ada berbagai permasalahan – permasalahan konkrit yang harus ditangani yang biasanya terjadi akibat kurangnya koordinasi dan *controlling* dengan pihak – pihak yang terlibat didalamnya, seperti yang terjadi

pada Pasar Klakah di Kabupaten Lumajang ini yang menimbulkan beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan.

Adapun hal – hal yang menarik peneliti untuk melakukan penelitian ini antara lain :

1. Adanya pengaduan masyarakat mengenai kualitas pembangunan yang kurang maksimal kepada pemerintah desa setempat,
2. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai tugas, fungsi, dan peran Bappeda, padahal segala perumusan pembangunan daerah dapat disangkut pautkan dengan peranan Bappeda.

Berdasar uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai tugas, fungsi, serta peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terhadap pembangunan di Kabupaten Lumajang, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul : **“Pengaruh Produktivitas Kerja dan Pemberdayaan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Terhadap Kualitas Pembangunan Pasar Klakah Lumajang”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah produktivitas kerja berpengaruh secara parsial terhadap kualitas pembangunan daerah di Kabupaten Lumajang ?
2. Apakah pemberdayaan berpengaruh secara parsial terhadap kualitas pembangunan di Kabupaten Lumajang ?
3. Apakah produktivitas kerja dan pemberdayaan berpengaruh secara simultan terhadap kualitas pembangunan di Kabupaten Lumajang ?

C. Tujuan Penelitian

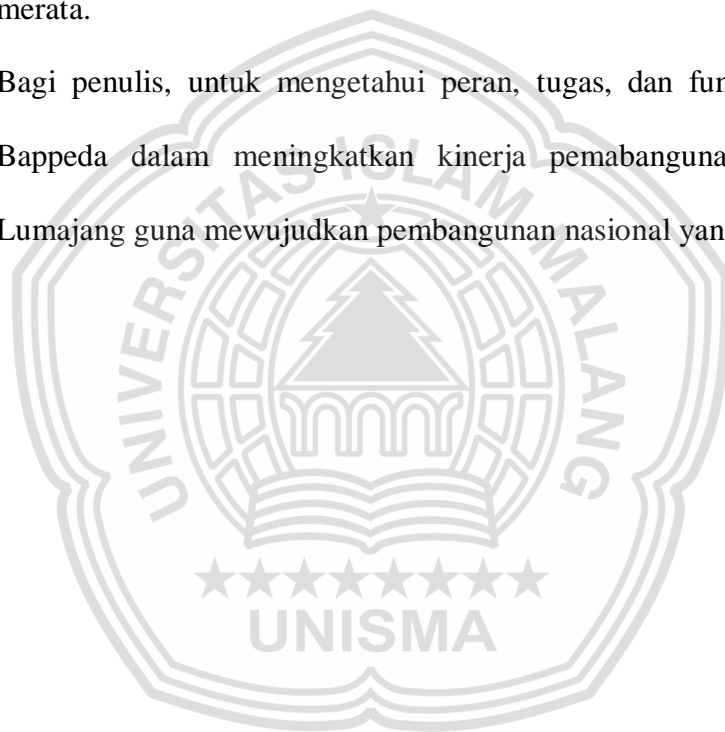
1. Untuk mengetahui pengaruh produktivitas kerja secara parsial terhadap kualitas pembangunan di Kabupaten Lumajang.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemberdayaan secara parsial terhadap kualitas pembangunan
3. Untuk mengetahui pengaruh produktivitas kerja dan pemberdayaan secara simultan terhadap kualitas pembangunan di Kabupaten Lumajang
di Kabupaten Lumajang

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian tentu bermanfaat dalam minindak lanjuti dari apa yang telah dirumuskan dalam tujuan penelitian. Adapun manfaat – manfaat penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai bahan informasi dan sumbang saran bagi Bappeda terhadap kualitas pembangunan di Kabupaten Lumajang
 - b. Sebagai penambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh produktivitas dan pemberdayaan pada Bappeda terhadap kualitas pembangunan di Kabupaten Lumajang
 - c. Sebagai salah satu acuan untuk penelitian berikutnya mengenai pengaruh produktivitas kinerja dan pemberdayaan pada Bappeda terhadap kualitas pembangunan di Kabupaten Lumajang
2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), diharapkan lebih mampu dalam mengoptimalkan pembangunan di Kabupaten Lumajang
- b. Bagi masyarakat, agar mendapat kejahteraan dan loyalitas serta mampu memberi kontribusi dalam perwujudan pembangunan nasional yang merata.
- c. Bagi penulis, untuk mengetahui peran, tugas, dan fungsi serta strategi Bappeda dalam meningkatkan kinerja pemabangunan di Kabupaten Lumajang guna mewujudkan pembangunan nasional yang merata



BAB V

PENUTUP

i. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Variabel Produktivitas Kerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Pembangunan di Pasar klakah Lumajang.
- b. Variabel Pemberdayaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Pembangunan di Pasar Klakah Lumajang.
- c. Produktivitas Kerja dan Pemberdayaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Pembangunan di Pasar Klakah Lumajang.

ii. KETERBATASAN ★★★★★★

- a. Sampel yang digunakan hanya pada pelaku usaha dan tenaga operasional pengelola pasar Klakah Lumajang. Sehingga hasil penelitian tidak dapat digunakan sebagai dasar kesimpulan secara umum, karena hanya mengetahui dan menjelaskan pengaruh produktivitas kunerja dan pemberdayaan pada Badan Perencanaan Pemabangunan Daerah terhadap kualitas pembangunan di pasar Klakah Lumajang
- b. Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini terbatas hanya sebesar 60 responden.

- c. Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi sebesar 0,247 yang berarti kontribusi hanya sebesar 24,7% yang artinya penelitian ini berkontribusi masih kecil. Sehingga sisanya terdapat pada variabel yang lain dan pada selanjutnya peneliti diharapkan untuk menambah variabel bebas yang lebih dekat dapat berpengaruh terhadap kualitas pembangunan daerah.

iii. SARAN

Berdasarkan dari kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan diatas perkenankanlah penulis untuk memberikan saran mungkin dapat dijadikan acuan untuk ke arah yang lebih baik, khususnya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lumajang sebagai berikut:

- a. Bagi Perencanaan Pembangunan Daerah Lumajang, berdasarkan dari hasil penelitian hendaknya Perencanaan Pembangunan Daerah Lumajang lebih meningkatkan produktivitas kerja dan pemberdayaan masyarakat dalam setiap pembangunan daerah guna menciptakan kesejahteraan bersama.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, perlu menambahkan jumlah responden dan variabel bebas pada penelitian ini tidak cukup untuk membuktikan seberapa besar pengaruh produktivitas kerja dan pemberdayaan, melainkan ditambahkan untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi, misalnya efisiensi dan efektivitas dalam suatu pembangunan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Afifuddin. 2015. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung : Alfabeta

Efferin, Dkk. 2004. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia

Ervianto. 2004. *Teori Aplikasi Manajemen Proyek Kontruksi*. Yogyakarta : Andi Offset.

Furchan, Arief. 2007. *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*. Malang : Pustaka Pelajar

Ghozali. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Gurajati, Damonar. 2003. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta : Erlangga

Hadi, Sutrisno. 1986. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.

Hadi, Sudarto. *Manusia Dan Lingkungan*. Semarang : 2000

Hayat. 2018. *Kebijakan Publik*. Malang : Intrans Publishing

Hayat. 2018. *Reformasi Kebijakan Publik Perspektif Makro dan Mikro*. Jakarta : Prenadamedia Group

HR. Syaukani, dkk. 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Kansil. 1995. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara

Kartasasmitha, Ginanjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*. Jakarta : Pustaka Cidesindo

- Kasiram. 2008. *Metodologi penelitian*. Malang : UIN-Malang Pers
- Kuncoro, Mudrajad. 2012. *Perencanaan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat
- Muslim, Aziz. 2012. *Pendekatan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : Samudra Biru
- Purwadarminta. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Sarundajang. 2002. *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*. Jakarta: PustakaSinarHarapan,
- Sekaran Dan Boogie. 2017. *Metode Penelitian Untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan Keahlian*. Jakarta : Salemba Empat
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta. BumiAksara.
- Solihin, Dadang. 2000. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta : Gramedia
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Jakarta : Alfabeta
- Sugiyono. 2010. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung : Refika Aditama
- Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS
- Tarigan, Robinson. 2010. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta : Bumi Aksara
- Umar, Husen. 2000. *Metode Penelitian, Aplikasi Dalam Pemasaran*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Zubaedi. 2007. *Wacana Pembangunan Alternatif : Ragam Perspektif Pengembangan Dan Pernerdayaan Masyarakat*. Yogyakarta :Ar-Ruzz Media.

Jurnal dan Skripsi :

Anggraini, Iga Rossa. 2020. *Pengaruh Analisis Jabatan Terhadap Kinerja Pegawai Badan Kepegawauian Daerah Kota Malang*. Skripsi. Universitas Islam Malang : Malang

Bahralipi, Yudianto. 2012. *Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Pembangunan Desa di Kabupaten Jenepono*. Skripsi. . UIN Alauddin : Malang

Bahri, Samsul. 2011. *Pengaruh Kebijakan Kepala Bappeda terhadap Peningkatan Kedisiplinan Pegawai pada Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar*. Skripsi. UIN Alauddin : Makassar

Nadir, Sakinah. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa : Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa Vol. 1 No. 1 Tahun 2013*

Nugraha, Andi. *Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial dalam Konsep Pemberdayaan di Bidang Ekonomi Vol. 5 No. 2. Juni. 2009.*

Prayudha, Eka Nugraha. 2017. *Peranan Badan Perencanaan Pemabangunan Daerah Dalam Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat*. Skripsi. Universitas Lampung : Lampung.

Sunarwanti. 2015. *Pengaruh Pemberdayaan Masyarakat terhadap Pelaksanaan Pembangunan Pada Kantor Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur*. Skripsi. Universitas 17 Agustus 1945 : Samarinda

Taufik, Much. *Peranan Bappeda dalam Peningkatan Kualitas Perencanaan Partisipatif pada Sistem Perencanaan Pembangunan Kota Blitar Vol. 13 No. 2 April 2010*

Wahyuni, Fitri. 2020. *Pengaruh Customer Service Quality, Customer Satisfaction, Switching Cost, dan Trust in Brand Terhadap Costomer*

Retention pada Pengguna Kartu SimPATI Telkomsel Malang. Skripsi.
Universitas Islam Malang : Malang

Undang – Undang dan Peraturan Lainnya :

Undang Undang Pasal 1 Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Internet :

https://id.wikipedia.org/wiki/kabupaten_lumajang

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Perencanaan_Pembangunan_Daerah

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemerintah>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peran>